

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Instansi**

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007. Sedangkan Menurut Gade (1993: 115) dalam Sastia (2011: 8) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan instansi.

Menurut Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan salah satu bentuk Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang bertujuan untuk:

- 1) Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
- 2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk

menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.

- 3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara Keseluruhan.
- 4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Berdasarkan definisi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pelaksanaannya terdiri atas dokumen sumber dan prosedur penyusunan laporan keuangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Dokumen sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja adalah:

- a. Dokumen penerimaan terdiri dari:

1. Estimasi pendapatan yang dialokasikan: (DIPA, PNBPN dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang di persamakan dengan DIPA).

2. Realisasi pendapatan: Bukti Penerimaan Negara (BPN) disertai dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, dan dokumen lain yang di persamakan.
- b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari:
    1. Alokasi anggaran DIPA, SKO, dan dokumen lain yang dipersamakan;
    2. Realisasi pengeluaran: SPM dan SP2D, dan dokumen lain yang dipersamakan.
  - c. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jurnal aset
  - d. Dokumen Perlengkapan yaitu Dokumen Piutang antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umum piutang. Serta dokumen persediaan antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan.
- 2) Prosedur penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Tahapan perekaman dokumen sumber sampai dengan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
- Kegiatan harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
1. Menerima dan memverifikasi laporan keuangan beserta ADK yang diterima dari UAKPA setiap bulan.
  2. Menggabungkan data laporan keuangan dari masing-masing UAKPA yang berada dibawahnya.

3. Melakukan pencocokan hasil penggabungan data BMN dengan UAPPB-W setiap semester.
4. Menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil Ditjen PBN, menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan UAPPA-W.
5. Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menyampaikannya Ke UAPPA-E1 beserta ADK sesuai jadwal penyampaian.
6. Penyusunan catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-E1 setiap semester.
7. Melakukan *backup* data.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri atas dua subsistem, yaitu:

- 1) Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementerian/instansi.

SAK menghasilkan LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, namun laporan keuangan yang dihasilkan tersebut merupakan laporan keuangan pada tingkat kementerian/lembaga. Dikarenakan dalam struktur organisasi kementerian/lembaga sangat berjenjang dimulai dari kementerian/lembaga sampai dengan kantor/satuan kerja, maka dalam pelaksanaannya, dibentuk unit akuntansi keuangan pada jenjang-jenjang tersebut. Proses akuntansi diawali dari unit terendah, yaitu unit akuntansi pada level kantor.

Laporan keuangan yang dihasilkan kemudian akan diberikan kepada unit akuntansi di atasnya untuk digabung. Demikian seterusnya, sehingga pada akhirnya akan diperoleh laporan keuangan pada tingkat kementerian/lembaga.

Unit akuntansi keuangan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya adalah:

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yang berada pada level Kementerian/Lembaga.
  2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), yang berada pada level eselon 1.
  3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat wilayah.
  4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada level Kuasa Pengguna Anggaran (Kantor).
- 2) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Contoh perolehan lainnya yang sah adalah hibah atau rampasan/sitaan.

Tidak termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara adalah barang-barang yang dikuasai atau dimiliki oleh:

1. Pemda (bersumber dari APBD)
2. BUMN/ BUMD
3. Bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah

Dalam akuntansi pemerintah pusat, SIMAK-BMN sebagai subsistem dari Sistem Informasi Akuntansi bertujuan menghasilkan neraca dan laporan barang milik daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementrian/Lembaga membentuk Unit Akuntansi Barang sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), berada pada level Kementrian/Lembaga. Penanggungjawabnya adalah menteri/pimpinan lembaga.
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1), yang berada pada level eselon 1. Penanggung jawabnya adalah pejabat eselon 1.
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah. Penanggung jawabnya adalah kepala

kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada level Kuasa Pengguna Anggaran (kantor). Penanggung jawabnya adalah kepala kantor/satuan kerja.
5. Unit Akuntansi Barang, selain melakukan proses terhadap dokumen sumber untuk menghasilkan laporan barang milik negara, juga wajib berkoordinasi dengan Unit Akuntansi Keuangan untuk penyusunan neraca serta dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan khususnya catatan mengenai barang milik negara.

### **2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007: 1) dalam Fatmawati (2010: 16) adalah: bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) dan catatan atas laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Munawir (1990: 2) dalam Sastia (2011: 14), Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Sofyan (2004: 105) dalam Arif (2011), bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan dari hasil definisi-definisi yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

### **2.1.3 Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga yang dihasilkan unit akuntansi instansi tersebut terdiri dari:

#### **1) Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

#### **2) Neraca**



Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal.

### 3) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Pada umumnya komponen laporan keuangan sama dengan unsur yang dipersyaratkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003. Dalam pernyataan ini kemungkinan dapat diatur juga penggunaan basis akrual dengan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas tetapi laporan realisasi anggaran dalam basis kas harus tepat dibuat.

#### **2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis .

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 4), tujuan dari laporan keuangan adalah:

1. menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.
3. laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan padanya.

Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

### **2.1.5 Pengguna Laporan Keuangan**

Menurut Agustina (2010: 10), pengguna informasi akuntansi memiliki berbagai karakteristik dan cara pandang yang berbeda pula. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang

telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

- 1) Masyarakat;
- 2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- 4) Pemerintah.

#### **2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.71/2010 pasal 6 bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Sedangkan *International Public Sector Accounting Standar* (IPSAS) No. 1 tahun 2005 dalam Wuryan (2007: 21), menjelaskan agar laporan keuangan menjadi informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Berikut ini adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dipenuhi yakni:

- 1) Dapat dimengerti

Informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, para pemakai laporan keuangan diharapkan dapat mengerti atau memahami artinya.

2) *Relevance*

Informasi harus relevan bagi para pemakai laporan keuangan sehingga informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

3) *Materiality*

Informasi dikatakan material jika salah saji laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan.

4) *Reliability*

Informasi yang reliabel (dapat dipercaya) adalah informasi yang bebas bias dan kesalahan material.

5) *Faithful Representation*

Informasi mengenai transaksi atau kejadian lainnya secara tepat harus disajikan sesuai dengan substansi transaksi dan kejadian lainnya, serta tidak hanya bentuk formalitasnya saja.

6) *Substance Over Form*

Informasi akuntansi disajikan secara jujur atas transaksi dan kejadian yang seharusnya disajikan.

7) *Neutrality*

Informasi yang netral adalah informasi yang bebas dari bias.

8) *Prudence*

Kehati-hatian merupakan pelaksanaan pertimbangan yang memerlukan pembuatan estimasi menurut kondisi ketidakpastian.

9) *Completeness*

Informasi laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dengan batas materialitas dan biaya.

10) *Comparability*

Informasi dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan ketika para pemakai laporan keuangan mampu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara informasi.

### **2.1.7 Penyusunan Laporan Keuangan**

Menurut Sastia (2011: 21) Laporan Keuangan Pemerintahan disusun dengan mengikhtisarkan saldo-saldo perkiraan dari setiap pembukuan yang dilakukan oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban keuangan. Dengan melihat jumlah transaksi keuangan instansi pemerintahan yang sangat banyak dan terbagi dalam pusat pertanggungjawaban keuangan yang banyak pula, penyusunan laporan keuangan secara manual merupakan suatu hal yang cukup sulit dilakukan. Kalaupun bisa, hal hal menuntut kecermatan dan kehati-hatian yang tinggi karena laporan keuangan dari setiap pusat bertanggung jawab harus menunjukkan hasil yang sama.

Selain itu, yang perlu dipertimbangkan lagi adalah jangka waktu penyelesaian laporan. Laporan yang baik namun dihasilkan terlambat

akan berkurang nilai kegunaannya. Sementara laporan yang tepat waktu namun disusun asal-asalan juga tidak memberikan pengaruh positif dalam pengambilan suatu keputusan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dari penelitian ini, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan antara lain, yaitu:

- 1) Nento (2012). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi (SAI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi instansi (SAI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) = 0.642 atau 64,2%.
- 2) Choirunisah (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Instansi (Studi Kasus KPPN Malang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim dan sistem pengendalian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan SAI pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang. Faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi

adalah faktor kemampuan Sumber Daya Manusia dan pengorganisasian tim SAI.

- 3) Putri (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi SAI terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja UAPPA-W Vertikal di Kanwil Direktorat Jendral Provinsi Gorontalo). Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat diterima. Dengan demikian Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja dapat dijelaskan oleh penerapan Sai dengan kontribusi total sebesar 0,413 % artinya jika SAI diterapkan, maka Laporan Keuangan berkualitas sebesar 41,3 %

**Tabel 1: Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Nento (2012)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo).	Sistem Akuntansi Instansi, Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi instansi (SAI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) = 0.642 atau 64,2%.
Choirunisah (2008)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Instansi (Studi Kasus KPPN Malang).	Kualitas Laporan Sistem Instansi, Informasi Keuangan, Akuntansi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim dan sistem pengendalian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan SAI pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang. Faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi adalah faktor kemampuan Sumber Daya Manusia dan pengorganisasian tim SAI.
Putri (2011)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi SAI terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja UAPPA-W Vertikal di Kanwil Direktorat Jenderal Provinsi Gorontalo)	Sistem Akuntansi Instansi, Kualitas Laporan Keuangan	Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat diterima. Dengan demikian Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja dapat dijelaskan oleh penerapan Sai dengan kontribusi total sebesar 0,413 % artinya jika SAI diterapkan, maka Laporan Keuangan berkualitas sebesar 41,3 %

*Sumber : Hasil Olahan Data, 2013*



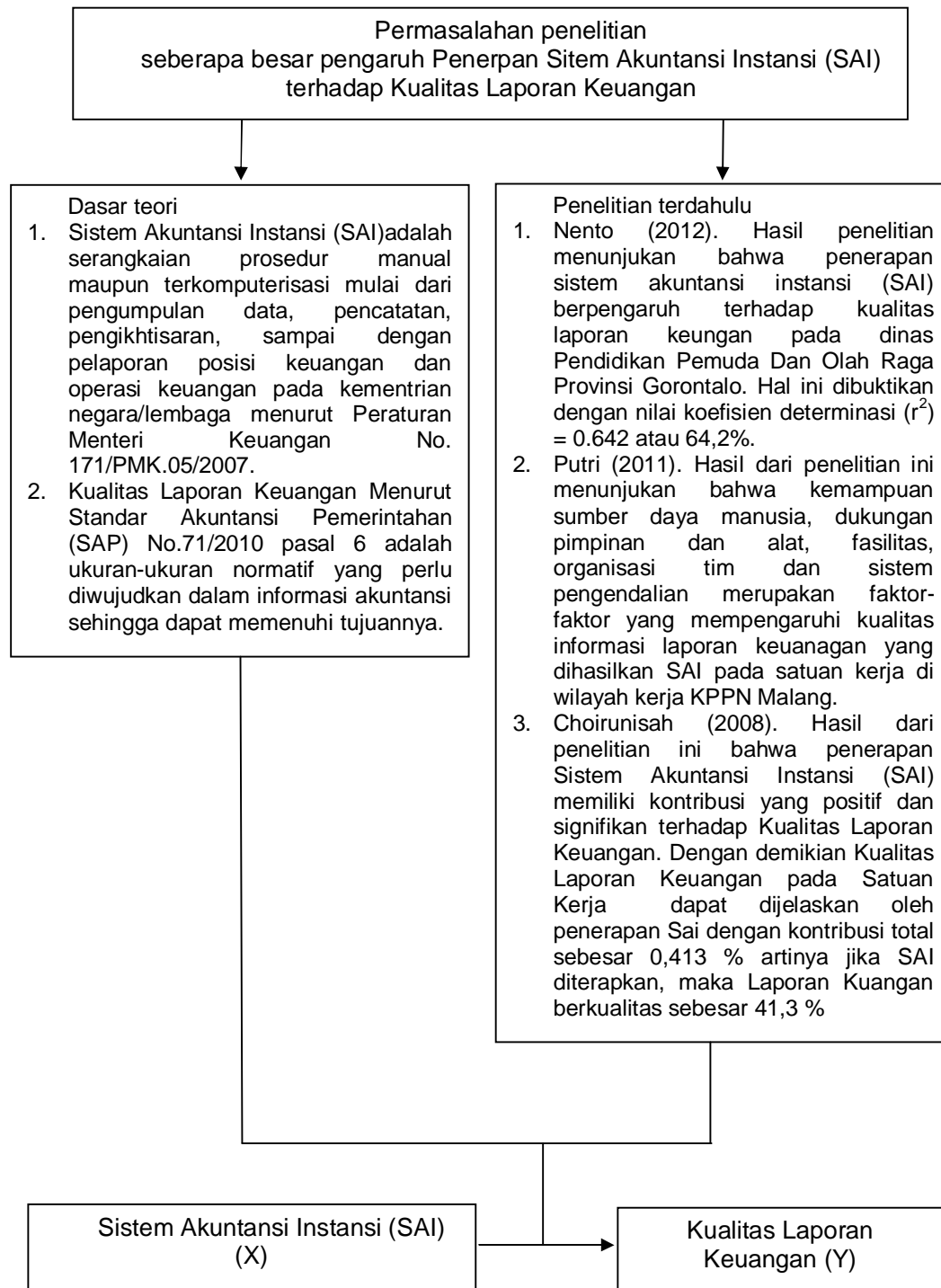
### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007. Sedangkan Menurut Gade (1993: 115) dalam Sastia (2011: 8) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan instansi.

Sedangkan kualitas laporan keuangan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.71/2010 pasal 6 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Selain dengan pemikiran yang dijelaskan di atas, maka peneliti ini mengkaji Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1: Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Sugiyono (2012: 64), mengemukakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan teori diatas maka hipotesis dalam penelitian ini di duga bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.